



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
**UNIT KERJA** : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AHMAD RUSNANDAR, S.SOS. M.SI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN TATA USAHA
3. NHK : 408684

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.736.550.000</b>
1. Tanah Seluas 525 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI , Rp. 262.500.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/400 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/21 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
4. Tanah Seluas 279 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
5. Tanah Seluas 883 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI , Rp. 132.450.000		
6. Tanah Seluas 1.744 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI , Rp. 261.600.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>150.000.000</b>
1. MOBIL, HONDA BRIO MINI BUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>55.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>22.963.793</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.964.513.793</b>



III. HUTANG

Rp. 252.981.498

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.711.532.295

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.